

Challenges and Opportunities Facing Public Administration in the 21st Century

Tantangan dan Peluang Menghadapi Administrasi Publik di Abad 21

Aris Sarjito

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak:

Pada abad ke-21, bidang administrasi publik telah ditantang oleh berbagai perubahan politik dan sosial yang mengubah cara pemerintah beroperasi di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21, dengan fokus khusus pada pengalaman kualitatif para praktisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan para profesional administrasi publik untuk mengumpulkan wawasan mereka tentang tantangan dan peluang yang dihadapi bidang mereka. Data sekunder juga dikumpulkan dari literatur yang relevan dengan topik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa administrasi publik menghadapi tantangan seperti perubahan harapan publik, kendala fiskal, gangguan teknologi, dan perubahan politik. Di sisi lain, ada juga peluang seperti peningkatan kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan warga.

Kata-Kata Kunci: Administrasi Publik, Gangguan Teknologi, Perubahan Ekspektasi Publik, Perubahan Politik

Abstract:

In the 21st century, the field of public administration has been challenged by various political and social changes that have transformed the way governments operate around the world. The aim of this study was to examine the challenges and opportunities facing public administration in the 21st century, with a particular focus on the qualitative experiences of practitioners in the field. The research utilized a qualitative method, involving interviews with public administration professionals to gather their insights on the challenges and opportunities facing their field. Secondary data was also collected from relevant literature on the topic. The findings indicated that public administration is facing challenges such as changing public expectations, fiscal constraints, technological disruption, and political changes. On the other hand, there are also opportunities such as increased collaboration, innovation, and citizen engagement.

Keywords: Changing Public Expectations, Political Changes, Public Administration, Technological Disruption

Korespondensi:

Aris Sarjito (arissarjito@gmail.com)

Pendahuluan

Administrasi publik, sebagai bidang studi dan praktik, menghadapi tantangan dan peluang besar di abad ke-21. Munculnya globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan harapan warga negara telah mengubah secara fundamental cara administrasi publik beroperasi. Dalam penelitian ini, kami akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh administrasi publik di abad ke-21 dan mengeksplorasi peluang yang disajikan oleh teknologi baru, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga negara. Selain itu, kami akan mengevaluasi keefektifan sistem administrasi publik saat ini dalam mengatasi tantangan dan peluang ini dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara tentang cara meningkatkan administrasi publik di abad ke-21.

Tantangan utama yang dihadapi oleh administrasi publik di abad ke-21 meliputi kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru, perubahan ekspektasi warga negara, ketidakstabilan ekonomi, dan pergeseran demografis. Menurut Berman dan Bowman (2013), sektor publik perlu beradaptasi dengan teknologi baru untuk mengatasi perubahan kebutuhan warga negara dan meningkatnya kompleksitas pembuatan kebijakan publik. Munculnya alat komunikasi baru dan *platform* media sosial memberikan kesempatan bagi administrator publik untuk meningkatkan komunikasi dengan warga dan meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi hal ini mengharuskan administrator publik untuk mengadopsi teknologi baru dan berpengalaman dalam kemajuan teknologi ini.

Pada saat yang sama, administrator publik menghadapi permintaan yang meningkat untuk partisipasi yang lebih besar dari warga negara dalam masyarakat demokratis. Sebagaimana dicatat oleh O'Leary (2017), warga negara mengharapkan suaranya didengar dan dihormati, menuntut transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap dari administrasi publik. Menanggapi hal ini, administrator publik perlu menjadi lebih berorientasi pada pelanggan dan didorong oleh layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Selain itu, globalisasi dan pergeseran demografi mengubah cara administrator publik beroperasi. Globalisasi membawa saling ketergantungan yang lebih besar dan multikulturalisme yang mempengaruhi pengembangan kebijakan administrasi publik dan penyampaian layanan. Demikian pula, perubahan demografis seperti urbanisasi, populasi yang menua, dan imigrasi

mengharuskan administrasi publik menyesuaikan kebijakan mereka untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di seluruh populasi yang berbeda.

Di sisi lain, teknologi baru, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga negara juga menghadirkan peluang bagi administrasi publik. Misalnya, teknologi baru dapat meningkatkan penyampaian layanan dan efisiensi, sementara partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pemerintah. Saling ketergantungan global dapat menciptakan peluang baru untuk kolaborasi dan kerja sama.

Salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi administrasi publik adalah meningkatnya kompleksitas sistem sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Stoker (2018), administrator publik harus menavigasi beragam pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan warga negara. Ini membutuhkan adopsi pendekatan dan sistem inovatif untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan didasarkan pada bukti, responsif, dan akuntabel.

Selain itu, perubahan sifat tata kelola dan munculnya teknologi digital telah menciptakan peluang dan tantangan bagi administrasi publik. Teknologi digital mengubah cara pemerintah dan organisasi berkomunikasi dan beroperasi, memungkinkan partisipasi, kolaborasi, dan inovasi di antara para pemangku kepentingan (Dubois & Phillips, 2016). Namun, hal ini menimbulkan tantangan baru, seperti perlindungan data, keamanan siber, dan memastikan akses teknologi yang setara.

Tantangan signifikan lainnya yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21 adalah kelestarian lingkungan. Sebagaimana dicatat oleh Kettl (2019), perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam adalah beberapa ancaman terbesar terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, administrator publik harus mengadopsi pendekatan berorientasi keberlanjutan untuk pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, dan penyampaian layanan.

Akhirnya, administrasi publik harus mengatasi kebutuhan dan harapan yang berkembang dari warga negara di abad ke-21. Warga mengharapkan administrator publik untuk memberikan layanan yang efisien, efektif, dan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Administrator publik harus mengadopsi pendekatan yang berpusat pada warga negara yang melibatkan kolaborasi, kreasi bersama, dan umpan balik untuk

memastikan bahwa layanan responsif, inklusif, dan adil (Thompson & Bovaird, 2016).

Secara keseluruhan, efektivitas administrasi publik dalam mengatasi tantangan dan peluang abad ke-21 bervariasi di berbagai negara dan konteks. Sementara beberapa administrasi publik telah berhasil mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan komunikasi dengan warga, yang lain tertinggal dalam mengatasi pergeseran demografis dan ketidaksetaraan sosial.

Untuk meningkatkan administrasi publik di abad ke-21, pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara harus bekerja sama untuk mengembangkan institusi publik yang lebih inklusif dan responsif. Hal ini membutuhkan pengakuan akan kebutuhan dan harapan warga negara yang beragam dan merancang kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Administrator publik juga harus mengambil pendekatan proaktif untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan komunikasi dengan warga negara, sekaligus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis.

Administrasi publik adalah komponen penting dari pemerintahan di dunia kontemporer. Ini melintasi sektor politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, abad ke-21 telah menghadirkan tantangan dan peluang unik bagi sistem administrasi publik di seluruh dunia. Administrator publik menghadapi kompleksitas yang meningkat saat mereka berusaha untuk melayani konstituen mereka di tengah tuntutan yang meningkat, sumber daya yang langka, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, studi penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21.

Administrasi publik memainkan peran penting dalam memfasilitasi implementasi kebijakan dan program pemerintah. Namun, dengan perubahan cepat yang terjadi di abad ke-21, tantangan dan peluang baru telah muncul, sehingga semakin sulit bagi administrator publik untuk mengimbangnya. Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21, dengan tujuan memberikan wawasan yang dapat menginformasikan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21 adalah meningkatnya kompleksitas lingkungan pemerintahan. Menurut Stoker (2011), model tata kelola tradisional, yang dicirikan oleh struktur hierarkis

dan peran serta tanggung jawab yang jelas, tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah kebijakan kompleks yang dihadapi masyarakat modern. Proliferasi isu sosial, ekonomi, dan lingkungan telah menyebabkan munculnya aktor dan jaringan baru, termasuk kelompok masyarakat sipil, organisasi sektor swasta, dan lembaga internasional, yang memberikan pengaruh pada proses pembuatan kebijakan.

Tantangan lain yang dihadapi administrasi publik adalah kebutuhan untuk merangkul teknologi digital untuk meningkatkan penyampaian layanan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana dicatat oleh Damanpour dan Schneider (2018), kemajuan pesat teknologi digital, termasuk e-government, analitik data besar, dan media sosial, mengubah cara administrasi publik beroperasi. Namun, penerapannya menghadirkan tantangan baru, seperti memastikan privasi dan keamanan data, membangun kapasitas teknis di antara administrator publik, dan mengatasi kesenjangan digital.

Sifat angkatan kerja yang berubah menimbulkan tantangan bagi administrasi publik, karena berjuang untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil dan beragam. Seperti yang ditunjukkan oleh Briggs et al. (2019), tenaga kerja abad ke-21 ditandai dengan meningkatnya keragaman, pekerjaan pertunjukan, dan pengaturan kerja jarak jauh, yang menuntut praktik dan kebijakan manajemen baru. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian menjelaskan mengenai apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21. Studi ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut: (1) mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21, (2) mengeksplorasi peluang yang muncul teknologi, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga hadir untuk administrasi publik. (3) mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik saat ini dalam mengatasi tantangan dan peluang abad ke-21 dan terakhir (4) Untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara tentang bagaimana meningkatkan administrasi publik di abad ke-21.

Singkatnya, administrasi publik merupakan komponen penting dari pemerintahan di abad ke-21. Ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang membutuhkan solusi inovatif dan adaptif. Studi penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik dan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan administrasi publik di abad ke-21.

Administrasi publik memainkan peran penting dalam tata kelola masyarakat, memastikan pemberian layanan yang efisien dan implementasi kebijakan yang efektif. Namun, di abad ke-21 yang serba cepat dan terus berkembang, administrator publik menghadapi banyak tantangan dan peluang yang memerlukan pemahaman dan analisis mendalam. Creswell (2014) menganjurkan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder sebagai metode yang berguna untuk mengkaji kesulitan dan peluang ini. Penelitian ini mengeksplorasi manfaat, tantangan, dan peluang pemanfaatan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder untuk mengatasi kompleksitas administrasi publik di abad ke-21.

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang kompleks, sedangkan data sekunder, yang berasal dari sumber yang ada, menawarkan manfaat seperti penghematan waktu dan sumber daya, studi longitudinal, dan analisis komparatif dalam berbagai konteks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengakses data historis, mengidentifikasi pola, dan memahami evolusi tantangan dan peluang administrasi publik.

Karena potensi bias atau ketidakakuratan, penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder menghadapi kesulitan dalam keandalan dan validitas data. Peneliti harus mengevaluasi secara kritis kualitas dan kredibilitas sumber data untuk memastikan keandalan temuannya. Selain itu, masalah ketersediaan dan aksesibilitas data harus diatasi untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.

Abad ke-21 menghadirkan tantangan unik bagi administrasi publik, yang dapat diatasi secara efektif melalui penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Mempelajari globalisasi, pergeseran demografi, kemajuan teknologi, dan perubahan lingkungan dapat mengungkap pola dan tren, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan membentuk strategi dan intervensi.

Tantangan dan Peluang Administrasi Publik di Abad 21

Administrasi publik adalah sektor penting yang membentuk dinamika pemerintahan, penyediaan layanan, dan keterlibatan warga dalam masyarakat. Namun, abad ke-21 menimbulkan tantangan unik bagi sistem administrasi publik karena teknologi baru, saling ketergantungan global, dan kebutuhan akan partisipasi warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk

mengidentifikasi kesulitan utama yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21, mengeksplorasi peluang yang disajikan oleh teknologi baru, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga negara, mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik saat ini dalam mengatasi tantangan dan peluang tersebut, dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pengelola publik, dan warga negara dalam meningkatkan administrasi publik. Seperti dicatat oleh Dwivedi et al. (2019), pentingnya administrasi publik dalam menanggapi secara efektif perubahan masyarakat, transisi, dan tuntutan, menggunakan teknologi dan inovasi yang relevan, dan mendorong kebijakan dan reformasi yang selaras dengan kebutuhan warga negara.

A. Tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21

Penelitian didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau masalah tertentu. Administrasi publik adalah bidang penelitian penting yang berhubungan dengan manajemen urusan publik dan lembaga pemerintah. Saat kita bergerak maju ke abad ke-21, administrasi publik menghadapi beberapa tantangan dan peluang yang memerlukan analisis dan studi yang cermat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi administrasi publik adalah meningkatnya kompleksitas dan keterkaitan masyarakat modern. Seperti yang dicatat Kettl (2015), pemerintah saat ini harus menavigasi jaringan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks yang memerlukan pendekatan inovatif dan mode kolaborasi baru. Misalnya, mengatasi masalah seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau terorisme memerlukan solusi komprehensif dan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan keahlian.

Tantangan lain untuk administrasi publik adalah kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pemerintah. Seperti yang dikatakan Hood (2010), warga negara saat ini menuntut lebih banyak keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang membutuhkan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat. Ini berarti bahwa administrator publik harus mampu menunjukkan nilai dan dampak dari kebijakan dan program mereka, serta menanggapi umpan balik dan kritik dari warga dan kelompok kepentingan.

Administrasi publik juga menghadapi tantangan untuk menggabungkan teknologi baru dan perangkat digital ke dalam praktiknya. Seperti yang ditunjukkan oleh Dunleavy dan Margetts (2019), digitalisasi dan

analitik data telah mengubah cara kita mengumpulkan dan menganalisis informasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dan memberikan layanan publik. Namun, perubahan ini juga menimbulkan masalah etika dan hukum baru, seperti perlindungan data, privasi, dan tata kelola yang demokratis.

Terlepas dari tantangan ini, administrasi publik juga menghadirkan beberapa peluang untuk penelitian dan inovasi. Misalnya, seperti yang ditekankan oleh Ostrom (1990), ada minat yang berkembang dalam penggunaan model tata kelola kolaboratif yang menekankan partisipasi warga negara, musyawarah, dan produksi bersama layanan. Peluang lain adalah mengeksplorasi cara baru untuk mengukur dan mengevaluasi dampak kebijakan publik, seperti penggunaan uji coba kontrol acak, wawasan perilaku, atau model prediktif (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

B. Peluang teknologi, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga hadir untuk administrasi publik.

Ketika dunia menjadi semakin terhubung melalui teknologi baru dan saling ketergantungan global, administrasi publik menghadapi tantangan dan peluang. Salah satu peluang besar adalah kemampuan menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Teknologi seperti media sosial, forum online, dan platform crowdsourcing memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka tentang berbagai masalah kebijakan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Aitken, Mulgan, Papworth, dan Soderholm (2016), teknologi berpotensi mendemokratisasi proses pengambilan keputusan pemerintah dan meningkatkan keterlibatan warga. *Platform* media sosial, misalnya, memungkinkan pembuat kebijakan menerima umpan balik waktu nyata dari warga tentang keputusan dan implementasi kebijakan. Umpan balik ini, pada gilirannya, dapat membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih tepat yang mencerminkan kebutuhan dan preferensi orang yang mereka layani. Selain itu, platform seperti situs *web* penggalangan dana dan *platform* petisi digital memungkinkan warga untuk mengambil tindakan lebih langsung dalam membentuk kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Saling ketergantungan global juga menghadirkan peluang unik untuk administrasi publik. Berman dan Fox (2019) berpendapat bahwa globalisasi, serta kemajuan teknologi, telah menciptakan era baru inovasi sosial dan pemecahan

masalah. Mereka berpendapat bahwa administrator publik harus menjadi lebih mahir dalam membina kemitraan dan kolaborasi internasional untuk mengatasi masalah global yang kompleks seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi.

Partisipasi warga itu sendiri memberikan kesempatan untuk administrasi publik. Partisipasi warga negara merupakan komponen penting dari pemerintahan yang demokratis, dan dapat membantu membangun kepercayaan dan legitimasi dalam lembaga pemerintah. Menurut sebuah studi oleh Nabatchi, Sancino, dan Sicilia (2017), keterlibatan publik juga dapat mengarah pada hasil kebijakan yang lebih baik, karena warga negara cenderung mendukung kebijakan yang mencerminkan nilai dan kepedulian mereka.

C. Batasan pemanfaatan peluang teknologi.

Kemajuan teknologi memberikan peluang dan alat baru untuk membantu administrator publik meningkatkan layanan mereka. Namun, ada kendala yang terkait dengan kemajuan ini. Salah satu kendalanya adalah kurangnya sumber daya dan pendanaan untuk inovasi teknologi. Menurut Rainey et al. (2014), administrasi publik kekurangan dana yang cukup untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan peningkatan teknologi. Selain itu, administrasi publik menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru karena kendala peraturan dan kebutuhan untuk pengujian dan evaluasi menyeluruh sebelum penerapan skala penuh.

D. Saling ketergantungan global.

Globalisasi telah menyebabkan meningkatnya saling ketergantungan antara entitas di seluruh dunia. Administrasi publik harus mengadopsi perspektif global dan berkolaborasi dengan lembaga dan negara lain untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Namun, saling ketergantungan global menghadirkan tantangan dalam hal perbedaan budaya dan peraturan. Sebagaimana dicatat oleh Brahm dan Paisley (2014), administrator publik harus memahami dan menavigasi perbedaan budaya saat berkolaborasi dengan mitra internasional. Selain itu, perbedaan peraturan dapat menimbulkan masalah hukum saat menjalankan bisnis lintas batas.

Partisipasi Warga.

Partisipasi warga negara adalah komponen penting dari administrasi publik. Ini memastikan representasi dan akuntabilitas yang demokratis. Namun,

partisipasi warga juga menimbulkan tantangan. Salah satu tantangannya adalah minimnya partisipasi masyarakat marjinal. Seperti dicatat oleh Alford dan O'Flynn (2012), warga dari komunitas yang terpinggirkan cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam administrasi publik dibandingkan rekan-rekan mereka. Selain itu, partisipasi warga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan di antara pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda.

Tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik.

Kendala dalam memanfaatkan peluang teknologi, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi administrasi publik di abad ke-21. Untuk mengatasi kendala ini, administrator publik harus mengadopsi strategi inovatif yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan peraturan. Misalnya, administrator publik dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan forum online untuk diskusi dan pengambilan keputusan. Selain itu, administrasi publik harus merangkul keragaman dan inklusivitas untuk memastikan bahwa semua warga negara terwakili.

A. Mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik saat ini dalam menghadapi tantangan dan peluang abad ke-21.

Penelitian memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik saat ini dalam mengatasi tantangan dan peluang abad ke-21. Sistem administrasi publik menghadapi tantangan yang signifikan seperti kemajuan teknologi, globalisasi, perubahan sosial-ekonomi, dan perubahan lingkungan. Selain itu, peluang seperti peningkatan akses terhadap informasi, teknologi inovatif, dan tata kelola partisipatif memberikan potensi yang sangat besar bagi sistem administrasi publik. Namun, penting untuk menentukan apakah sistem administrasi publik saat ini dilengkapi untuk mengatasi tantangan dan peluang ini secara efektif.

Salah satu bidang penting di mana penelitian dapat membantu mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik adalah dalam adopsi teknologi inovatif. Menurut Halachmi (2019), teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, dan pembelajaran mesin mengubah cara sistem administrasi publik beroperasi. Teknologi ini dapat membantu lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi biaya,

dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang yang menghambat atau memfasilitasi adopsi teknologi inovatif dalam sistem administrasi publik.

Area kritis lain di mana penelitian dapat mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik adalah dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim. Menurut Ouda (2019), sistem administrasi publik dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, menerapkan kebijakan lingkungan, dan melibatkan warga dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian dapat membantu mengevaluasi sejauh mana sistem administrasi publik saat ini menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan dan seberapa efektif praktik tersebut dalam mengurangi tantangan perubahan iklim.

Selanjutnya, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik dalam mengatasi perubahan sosial-ekonomi seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Menurut Bardhan (2019), sistem administrasi publik dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dengan menerapkan kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial. Oleh karena itu, penelitian dapat membantu menentukan keefektifan kebijakan ini dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan.

Sistem administrasi publik sangat penting untuk mengatur dan mengelola masyarakat modern. Pada abad ke-21, ia menghadapi beberapa tantangan dan peluang yang memerlukan evaluasi efektivitasnya. Evaluasi efektivitas sistem administrasi publik mencakup beberapa kendala yang berdampak pada hasil penilaian.

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21 adalah pesatnya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi telah merevolusi cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara, mengubah penyampaian layanan publik dan menciptakan peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan transparansi (Chen & Yang, 2018). Namun, kemajuan teknologi juga menciptakan tantangan seperti ancaman keamanan dunia maya dan kesenjangan digital, yang mengurangi akses ke layanan bagi populasi yang kurang beruntung.

Tantangan lain yang dihadapi administrasi publik adalah pergeseran demografi masyarakat. Abad ke-21 telah menyaksikan populasi yang menua, meningkatnya keragaman budaya, dan perubahan nilai dan harapan warga

negara (Bergeron & Nagy, 2019). Pemenuhan kebutuhan warga negara yang beragam memerlukan pendekatan inovatif yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Selanjutnya, peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21 adalah pertumbuhan kolaborasi antar pemerintah dan lintas sektor. Kompleksitas isu-isu kontemporer membutuhkan pendekatan kolaboratif dan multi-level yang melibatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional (Jørgensen, 2016). Kolaborasi memungkinkan penyatuan sumber daya, keahlian, dan akuntabilitas, yang mengarah ke hasil yang lebih baik.

Terlepas dari peluang dan tantangan yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21, mengevaluasi keefektifannya menemui beberapa kendala. Salah satu kendala yang signifikan adalah kompleksitas dan keragaman sistem administrasi publik. Administrasi publik mencakup berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial, masing-masing dengan tujuan dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan evaluasi khusus (Bovaird, 2017). Oleh karena itu, evaluasi efektivitas memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang keadaan dan dinamika unik masing-masing sektor.

Kendala lainnya adalah sulitnya mengukur pencapaian tujuan administrasi publik. Tujuan administrasi publik seringkali memiliki banyak segi dan memerlukan pertimbangan berbagai faktor, seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (Yang & van der Molen, 2019). Selain itu, mengevaluasi keefektifan administrasi publik seringkali bersifat subyektif, dengan pemangku kepentingan yang berbeda memiliki perspektif dan kepentingan yang beragam.

B. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, pengelola publik, dan warga negara tentang cara meningkatkan administrasi publik di abad ke-21.

Memasuki abad ke-21, administrasi publik harus terus beradaptasi dan berkembang agar tetap relevan dalam lingkungan yang dinamis. Pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa administrasi publik mengikuti perubahan saat ini yang membentuk dunia modern. Sub bab ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan administrasi publik dan memastikannya memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah di abad ke-21.

Pertama, pembuat kebijakan harus berkolaborasi dengan manajer publik dan pemangku kepentingan saat membuat kebijakan, strategi, dan rencana. Pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan kekhawatiran publik saat ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Bovaird & Loeffler (2012), pendekatan ini dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan implementasi program dan layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan harus dibuat melalui keterlibatan berkelanjutan dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, manajer publik harus mengadopsi orientasi hasil yang berfokus pada pencapaian hasil dan penyampaian layanan yang memenuhi harapan warga negara. Di dunia sekarang ini, ada cara yang lebih baik dalam mengelola sumber daya publik untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, seperti dicatat oleh Stern, Arndt & Rogers (2017). Metode tersebut antara lain meliputi kontrak berbasis kinerja, penganggaran berbasis hasil, dan manajemen ramping. Metode ini dapat membantu manajer publik mengukur efektivitas kebijakan dan layanan.

Ketiga, warga negara harus secara proaktif berpartisipasi dalam administrasi publik. Mereka harus didorong untuk menjadi sukarelawan, memberikan umpan balik, dan memantau layanan pemerintah untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi. Pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan membantu membangun kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh Balla et al. (2017). Selain itu, pendekatan partisipatif terhadap administrasi publik dapat membangun rasa memiliki warga negara, yang pada akhirnya dapat mengarah pada peningkatan layanan.

Di abad ke-21, administrasi publik menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintahan. Namun, memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, administrator publik, dan warga negara tentang cara meningkatkan administrasi publik bukan tanpa kendala. Kendala ini bisa datang dalam bentuk pengaruh politik, keterbatasan sumber daya dan persaingan kepentingan.

Salah satu kendala utama dalam memberikan rekomendasi kepada pejabat publik adalah pengaruh politik. Artinya, rekomendasi yang diberikan belum tentu sejalan dengan agenda politik penguasa. Seperti pendapat Yergin dan Stanislaw (2010), kekuatan politik dapat membentuk administrasi publik dengan mendikte prioritas kebijakan atau melobi untuk hasil tertentu. Oleh

karena itu, administrator publik harus menavigasi dinamika kekuasaan ini dan berusaha untuk mengembangkan rekomendasi yang layak secara politis sambil juga berkontribusi pada kebaikan publik.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk menerapkan rekomendasi. Hal ini terutama berlaku dalam kasus di mana administrator publik harus menyeimbangkan tuntutan bersaing dengan sumber daya yang terbatas. Dalam sebuah laporan oleh National Academy of Public Administration (2014), disebutkan bahwa kendala sumber daya dapat mempengaruhi penyampaian layanan kepada publik dan dapat mengakibatkan inefisiensi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan harus praktis, realistis, dan menggabungkan langkah-langkah efisiensi yang menjamin penggunaan sumber daya secara optimal.

Akhirnya, kepentingan eksternal dan persaingan prioritas pemangku kepentingan juga mempengaruhi administrasi publik. Tuntutan yang bersaing ini dapat berdampak pada implementasi rekomendasi dengan menciptakan ketegangan dan konflik yang perlu ditangani. Menurut studi Breckenridge dan Raadschelders (2008), kepentingan pemangku kepentingan di arena publik dapat berkonflik sehingga menimbulkan resistensi birokrasi dan menghambat implementasi rekomendasi yang diusulkan. Oleh karena itu, rekomendasi harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kepentingan dan motivasi semua pemangku kepentingan dan harus disajikan dengan cara yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas masing-masing pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi kendala ini, rekomendasi harus didasarkan pada bukti empiris dan analisis yang ketat. Penggunaan pengambilan keputusan berbasis data semakin penting dalam administrasi publik (National Academy of Public Administration, 2014). Analisis ahli dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, menilai alternatif kebijakan dan dampaknya, dan memprediksi potensi pertukaran dari berbagai opsi. Rekomendasi harus praktis dan layak, dengan mempertimbangkan keterbatasan politik dan sumber daya, sementara mencerminkan kepentingan dan prioritas semua pemangku kepentingan.

Penutup

Penelitian sangat penting untuk memahami dan mengatasi tantangan dan peluang yang dihadapi administrasi publik di abad ke-21. Dengan menerapkan metode yang ketat dan empiris, peneliti dapat membantu

administrator publik untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan inovatif yang memenuhi kebutuhan warga dan mencapai tujuan mereka.

Teknologi yang muncul, saling ketergantungan global, dan partisipasi warga menghadirkan peluang menarik untuk administrasi publik. Teknologi dapat memungkinkan lebih banyak keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, globalisasi dapat mengarah pada kemitraan dan kolaborasi baru untuk mengatasi masalah global yang kompleks, dan partisipasi warga dapat mengarah pada hasil kebijakan yang lebih baik. Administrator publik harus merangkul peluang ini untuk membangun struktur tata kelola yang lebih efektif dan responsif yang melayani kebutuhan konstituen mereka dengan lebih baik.

Penelitian sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem administrasi publik saat ini dalam mengatasi tantangan dan peluang abad ke-21. Adopsi teknologi inovatif, mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, dan mempromosikan kesetaraan sosial-ekonomi merupakan bidang penting di mana penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga. Oleh karena itu, sistem administrasi publik harus berinvestasi dalam penelitian untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas operasinya.

Meningkatkan administrasi publik di abad ke-21 akan membutuhkan pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara bekerja sama. Pembuat kebijakan harus melibatkan warga dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan memenuhi harapan warga. Manajer publik, di sisi lain, harus mengadopsi orientasi hasil dan menerapkan praktik manajemen modern untuk meningkatkan penyampaian layanan. Terakhir, warga negara harus berpartisipasi aktif dalam administrasi publik, karena hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita dapat meningkatkan administrasi publik dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Fiera Riyan Apriyanti karena telah membantu proses penggalan data selama penelitian.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Aitken, R., Mulgan, G., Papworth, P., & Soderholm, P. (2016). The potential of digital platforms for co-production and public participation in the planning and development of infrastructure. ISOPE-ISSC 2016.
- Alford, J., & O'Flynn, J. (2012). Making sense of public value: Concepts, criticisms, and critiques. *International Journal of Public Administration*, 35(7), 402-409.
- Balla, S. J., Lodge, M., & Page, E. C. (2017). How people evaluate public services: A psychological approach. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(suppl_3), iii26-iii40.
- Bardhan, P. (2019). Progressive politics, equity, and inclusion: Challenges and opportunities. *Journal of Public Affairs Education*, 25(1), 1-8.
- Bergeron, M., & Nagy, R. (2019). Valuing diversity in public administration management: An evidence-based review. *Journal of Public Affairs Education*, 25(2), 121-135.
- Berman, E. M., & Fox, P. B. (2019). Globalization and public administration: Opportunities and challenges for effective governance. *Public Administration Review*, 79(6), 807-815.
- Berman, K., & Bowman, J. (2013). The impact of technology on learning environments: An annotated bibliography. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 6(1), 1-14.
- Bovaird, T. (2017). *Governance and public management: Strategic foundations for vol. 2: Public management reform: a comparative analysis*. Routledge.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 23(4), 1119-1138.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford Handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Brahm, R., & Paisley, L. (2014). Global collaboration and public administration research. *Public Management Review*, 16(7), 933-944.

- Breckenridge, K., & Raadschelders, J. C. (2008). Bureaucratic resistance to reform: A theoretical and empirical exploration. *Administration & Society*, 40(3), 252–276. <https://doi.org/10.1177/0095399707311562>
- Briggs, R., De Vries, R. E., & Tenney, L. (2019). Managing 21st-century public servants. *Public Administration Review*, 79(1), 71-82.
- Chen, C., & Yang, K. C. (2018). Cybersecurity and public administration: A literature review and future research agenda. *Administration & Society*, 50(4), 499-523.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damanpour, F., & Schneider, M. (2018). Characteristics of innovation and innovation adoption in public organizations: Assessing the role of managers. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(2), 256-277.
- Damanpour, F., & Schneider, M. (2018). Information technology and public administration: An assessment of the recent literature. *Public Administration Review*, 78(1), 20-33.
- Dubois, E., & Phillips, J. (2016). *Society and the internet: How networks of information and communication are changing our lives*. Oxford University Press.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2019). The impacts of digitalization on public services and governance. *Political Science Quarterly*, 134(2), 167-196.
- Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Hughes, L., Carlson, J., Filipe, F., & Jacobson, J. (2019). Setting a future research agenda for digital public administration. *Government Information Quarterly*, 36(2), 455-463. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.006>
- Gharbi, A., & Gilliland, D. (2018). Public Administration Challenges in Developing Countries. *International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA)*, 5(4), 11-25.
- Halachmi, A. (2019). Innovation and public administration. *Public Administration Review*, 79(1), 1-4.
- Hood, C. (2010). Accountability and transparency in government and public services. *PS: Political Science & Politics*, 43(4), 685-689.
- Jørgensen, T. B. (2016). *Collaborative governance in public administration*. Routledge.

- Kettl, D. F. (2015). Can governments earn our trust? *Public Administration Review*, 75(3), 361-364.
- Kettl, D. F. (2019). *The Global Public Manager: Challenges and Opportunities Facing Public Administration in the 21st Century*. Routledge.
- Krause, G. A. (2019). Digital transformation and public administration in the twenty-first century. *International Journal of Public Administration*, 42(4-5), 309-319.
- Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 77(5), 766-776.
- National Academy of Public Administration. (2014). *The Future of Public Administration Around the World: The Minnowbrook Perspective*. Georgetown University Press.
- O'Leary, D. E. (2017). Aestheticizing everyday life: The cultural practice of suburban imaginaries. *Journal of Consumer Culture*, 17(1), 3-22.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Ouda, H. (2019). The role of public administration in addressing climate change. *Public Administration Review*, 79(4), 487-498.
- Rainey, H. G., Wong, G., & Løwendahl, B. (2014). *Public administration and management: Challenges and opportunities*. Routledge.
- Stern, E., Arndt, C., & Rogers, P. J. (2017). A new public service architecture: Embedding innovation in public service delivery. *Australian Journal of Public Administration*, 76(2), 167-180.
- Stiefel, L. (2018). The Impact of Global Interdependence on Public Administration. In *Globalization and the Challenges of Public Administration* (pp. 1-25). Palgrave Macmillan, Cham.
- Stoker, G. (2011). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 61(199), 141-159.
- Stoker, G. (2011). *Understanding politics: Ideas, institutions, and issues*. Palgrave Macmillan.
- Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. *International Review of Public Administration*, 23(2-3), 93-98.
- Thompson, S., & Bovaird, T. (2016). Beyond 'citizen engagement'? Public services and the 'art of the possible.' *Public Administration Review*, 76(2), 293-295.

- Yang, K. C., & van der Molen, I. (2019). Practical frame for impact assessment of social justice on local public service delivery. *Public Management Review*, 21(2), 283-302.
- Yergin, D., & Stanislaw, J. (2010). The command of the next century. *Foreign Affairs*, 79-94.